

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM TEMBAK
(Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah (Muamalah)**

Oleh

M.HABIBI ALBAIHAQI

NPM : 1521030235

Jurusan : Muamalah



**FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1440 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM TEMBAK
(Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah (Muamalah)**

Oleh

M.HABIBI ALBAIHAQI

NPM : 1521030235

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H,S.Ag, M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1440 M/2019 M**

ABSTRAK

Desa Sukaraja, kecamatan Buay Madang, kabupaten OKU Timur salah satu desa yang terkenal dengan hasil buminya yaitu padi, namun di sisi lain salah satu masyarakatnya mempunyai usaha jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak sebagai penghasilan tambahan bagi perekonomian masyarakat Sukaraja. Melihat permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya Bagaimana praktek jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di desa tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit ikan lele di desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah *analisis diskriptif*. Untuk melakukan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif. Deduktif merupakan pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum untuk menilai kejadian khusus. Induktif merupakan metode analisa data dengan dimulai dari data yang khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem tembak di desa Sukaraja yaitu hitungan awal yang ditimbang lalu dari hasil timbangan tersebut dijadikan patokan untuk hitungan selanjutnya. Jual beli bibit ikan lele menggunakan sistem tembak dalam hukum Islam diperbolehkan karena sah menggunakan tradisi yang disepakati. Untuk praktisnya proses jual beli tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan (penjual atau pembeli) selain menggunakan sistem timbangan dalam jual beli merupakan salah satu cara yang sah (dibenarkan) Islam dan telah sesuai syarat dan rukun jual beli yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama Fiqh.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : M. Habibi Albaihaki
NPM : 1521030235
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM TEMBAK (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyah dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 198202042006041001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarama I Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM TEMBAK (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur)**. Disusun oleh, **M. Habibi Al-Baihaki** NPM. **1521030235**, Jurusan: **Muamalah**. Telah diuji kan pada hari/tanggal: **Selasa, 23 Juli 2019**.

TIM MUNAQOSHAH

Ketua : **Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag**

Sekretaris : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag**

Penguji I : **Marwin, S.H., M.H**

Penguji II : **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H**

Mengetahui


Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Fairuddin, M.H

NPM. **196210221993031002**

MOTTO

عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ض  kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹ (QS. An-Nisa(4) :29)



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.65

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Maryadi dan Ibunda Siti Romlah yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tersayang Dewi Masitoh dan Fitriani serta keluarga besar yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk menggapai cita-cita.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP

M. Habibi Albaihaki, dilahirkan di kota Muara Dua pada tanggal 19 April 1997 merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Maryadi dan Ibu Siti Romlah dengan kakak perempuan bernama Dewi Masyitoh dan Fitriani.

Jenjang pendidikan pertama penulis dimulai dari RA Al –Hidayahyang diselesaikan pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda Silir Sari Kec. Labuhan Ratu 4 Kab. Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2009, selanjutnya ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Huda Sukaraja Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur diselesaikan pada tahun 2012 kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Nurul Huda Sukaraja diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke UIN Raden Intan Lampung dan diterima di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari dan kekhilafan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. dan Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag, M.Ag pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan waktu, untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan pada penulis selama dibangku kuliah.
5. Teman-teman senasib dan seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah kelas C yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Ikanuha terimakasih untuk Reza Refaldi, Salman Ar-Rosid, Miftakhuddin, Arum Agustriana, Elny Yulinda Sari, Jullaiha, Diana Annisa Fitri yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman KKN dan PPS dan terimakasih untuk M. Den Iqbal, Khairuddin Aziz, Mariyansyah, Feri Thoni Ridho, Dori Islami, Adi Saputra yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Habibi Yusuf, Hengki Setiawan, M.Reza yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan do'a kehadirat Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak serta ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.



Bandar Lampung, 2019

Penulis

M. Habibi Albaihaki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	5

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum	11
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
C. Jual Beli Yang Dilarang	26
D. Macam-macam Jual Beli	35
E. Batalnya Jual Beli.....	36
F. Prinsip-prinsip Muamalah	37
G. <i>Urf</i> ° (Adat Kebiasaan)Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum	41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	49
B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Tembak	52
C. Pertimbangan Praktis Digunakannya Sistem Tembak Oleh Penjual ..	63
D. Sikap Pembeli Terhadap Penggunaan Sistem Tembak	64

BAB IV ANALISA DATA

Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Tembak di Desa Suka Raja Kec. Buay Madang Kab. Oku Timur.....	66
---	----

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74

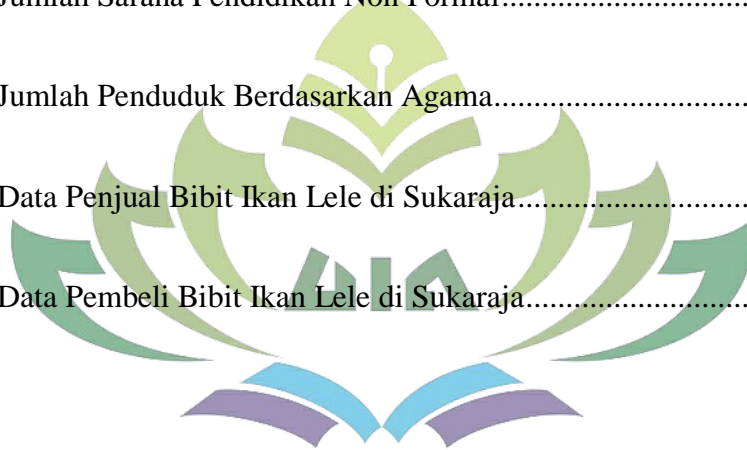
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Tingkat Ekonomi Masyarakat	51
Tabel 2 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk	51
Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan Formal.....	52
Tabel 4 Jumlah Sarana Pendidikan Non Formal.....	52
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	53
Tabel 6 Data Penjual Bibit Ikan Lele di Sukaraja.....	58
Tabel 7 Data Pembeli Bibit Ikan Lele di Sukaraja.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Transaksi jual beli pada saat ini menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Walaupun terkadang cara yang dilakukan dalam jual beli belum tentu benar dalam syariat Islam. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemahaman judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak”. Berikut adalah uraian definisi istilah yang berkaitan yaitu:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam menurut HasbyAsh-Shiddieqy adalah :

محاولات الفقهاء لتطبيق الشريعة علي حاجات مجموع المجتمع

Artinya : “Koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”²

3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Edisii Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) , h. 1060.

²Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h.44

dibenarkan syara' (hukum islam). Jual beli juga merupakan adanya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu.³

4. Bibit ikan lele adalah bibit ikan yang masih berumur 15-20 hari.
5. Sistem tembak dalam hal ini adalah hitungan awal yang kemudian ditimbang, lalu dari hasil timbangan tersebut dijadikan sebagai patokan hitungan selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka pengertian judul skripsi ini secara menyeluruh adalah, pandangan hukum islam tentang jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi ini untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Secara objektif, praktek jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak yang di dalamnya terdapat unsur praktis dari penjual, sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.
2. Secara subjektif, permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan yang peneliti tekuni di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peneliti memilih lokasi penelitian di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur karena lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti. Sehingga

³ Dimyauddin Duwayni, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200), h. 69

memudahkan peneliti melakukan penelitian dan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai desa tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Hubungan sosial dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi yang dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya.

Hubungan ekonomi meliputi kegiatan tukar menukar harta atau jasa yang merupakan sebuah fenomena lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'.

Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi : pertama, tentang keadaan barang yang akan

dijual. kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihandari milik penjual kepada pembeli. ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.Selain itu akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

Kehidupan modern ini, dengan berbagai kebutuhan yang meningkatdan menuntut untuk terpenuhi secara cepatdan efisien, sistem pertukaran semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain, sebagai contoh jual beli bibit lele di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur.

Masyarakat Sukaraja yang antusias dalam menekuni bisnis jual beli bibit lele ini, karena menurut mereka dengan memelihara dan menjual bibit lele mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupikebutuhan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di Desa Sukaraja Kec.Buay Madang Kab. OKU Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit dengan sistem tembak di desa tersebut?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit ikan lele di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan jual beli bibit ikan lele di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik pengumpulan data dan penertian atas topik, gejala tertentu. Berikut ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam hal ini dilakukan di lapangan atau pada responden, yakni tempat penjualan bibit ikan lele yang akan diteliti di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

Alasannya, penelitian menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif.⁴ Selain lapangan penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena

⁴ Djam'an Satori dan Aan Koariah , *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta,2010) h. 105

tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana praktik jual beli bibit ikan lele dalam sistem tembak ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵Yaitu masyarakat Sukaraja yang terlibat langsung dengan transaksi jual beli.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli (tidak melalui perantara) yaitu dikumpulkan melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain lain.⁶ Data primer tersebut tersebut didapatkan dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli bibit ikan lele.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa Al-quran, hadist, kitab-kitab fiqh, kitab undang-undang, serta sumber lain yang relevan.

⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*(Jakarta, Rajawali Pers1992), h. 18

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : AIFABETA,2011), h.224

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.⁷ Dalam suatu penelitian, peneliti akan menghadapi sebagai subyek penelitian, mengenai hal ini Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Jika populasi kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi.

Tetapi jika jumlah populasi besar, dapat diambil 10 – 15% atau 15-20 % atau lebih.⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli bibit ikan lele di desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur yang berjumlah kurang lebih 10 orang, yang terdiri dari 9 pembeli dan 1 penjual bibit ikan lele. Dengan demikian seluruh populasi dijadikan sampel.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Interview (wawancara) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.⁹ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan. Tujuannya untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI_PRESS, Jakarta, 2012, h.172

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.

⁹ *Ibid*, hal . 107.

- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁰ Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi.

6. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini dilakukan kembali pengecekan semua data yang telah terkumpul.

b. Sistematika Data (*sistemizing*)

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

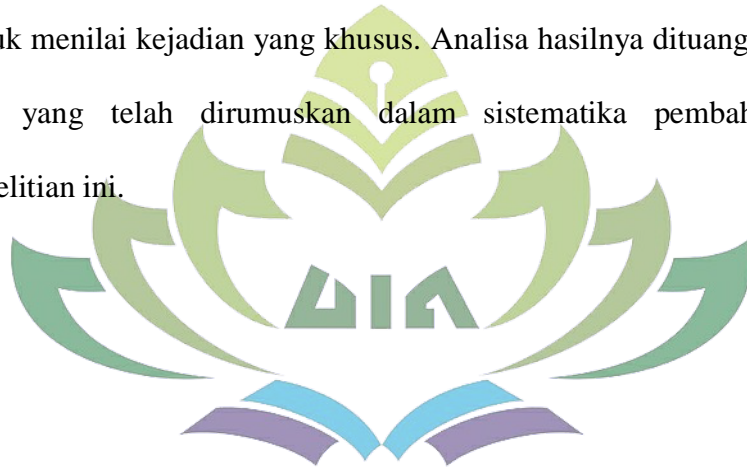
7. Analisa Data

Setelah data terhimpun selanjutnya data dianalisa secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis.

¹⁰Suharsimi Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), hlm. 188

Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Selain metode induktif, peneliti menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus. Analisa hasilnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan terhadap penelitian ini.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Allah SWT telah menentukan bahwa manusia tidak akan mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada zaman makin modern yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani dan rohani.

Menurut Syeikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi jual beli adalah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan izin pertukaran syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.

Menurut ulama' Malikiyah jual beli terbagi menjadi dua yaitu khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti umum yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada

dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi serta dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) pada penjual.

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama terdapat dasar-dasar yang menjadi landasan bagi umatnya. Seperti dalam jual beli, sebagian besar para Ulama' memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dasar hukum yang berlaku. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al- ba'i*. Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Fathir (35): 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah (2) :275)²

Menurut Hendi Suhendi bahwa jual beli menurut istilah merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.³

Menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.36

²*Ibid*, h.36

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.

bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁴ Muamalah secara sempit merupakan aturan Allah yang paling baik digunakan dalam hal memenuhi keperluan jasmani antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah ditetapkan aturan yang mengatur tentang muamalah, dimana dari waktu kewaktu aturan manusia selalu berubah seiring perkembangan zaman. Kemudian pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk menetapkan aturan yang paling sesuai dengan situasi zaman saat itu. Oleh sebab itu, dalam muamalah aturan harus disesuaikan dengan waktu dan tempat yang paling ideal dan aturan dalam muammalah menjadi sangat fleksibel.

Secara terminologi menurut ulama' Hanafi mendefinisikan jual beli yaitu: "Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu."⁵ Pengertian yang dimaksudkan ulama' Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (pernyataan penjual dari penjual), atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli secara etimologi yaitu pertukaran mutlak. Kata *al-ba'i* 'jual' dan *asy-syira* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Jual beli dalam syariat Islam merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara

⁴Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), h. 112

⁵ *Ibid*, h. 111

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 113

keduanya. Atau dengan memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁷

Dengan demikian muamalah yaitu sebagai suatu bentuk aturan yang membatasi hubungan manusia satu dengan yang lain juga hubungan manusia dengan benda-benda disekitarnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sistem Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, dan berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi. Sistem islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muammalah sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Adapun dasar hukum jual beli yaitu:

a. Al-Quran

Dalil hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat-ayat berikut ini:

Qs. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ^ط
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya 2006), h. 121

Artinya :Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.⁸

Qs.An-Nur (24) ayat 37 sebagai berikut :

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya : “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”⁹

Qs. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.283

⁹*Ibid*, h.129

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

*mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*¹⁰

Qs. An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

b. As-Sunah

Sunnah sering disamakan dengan hadits, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Adapun dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : "Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.” (HR.Al-Bazzar dan al-Hakim).¹²

¹⁰ Ibid, h.290

¹¹ Ibid, h.29

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Juz III, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, (Semarang: 1958), h. 4

Hadits di atas menjelaskan *Ba'i al-mabrur* jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan terhadap sesuatu. Secara terminologis ijma' merupakan kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.¹³ Ijma' adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang sesuai.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkan, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul.

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

¹³Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h. 165

Tetapi, unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang.

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga yaitu, *Aqidain* (dua orang yang berakad), *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *Shigat* (ijab-qabul). Ulama Syaf'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa para ulama sepakat tentang *shigot* (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighot* termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Terdapat perbedaan pendapat ulama terletak pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). Sehingga perbedaan tersebut dapat dikatakan *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabiyah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafiiyah.

¹⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17

Menurut *shighot*, *aqidain* dan *ma'qud alaih* lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ketiganya dalam praktik jual beli tidak akan terlaksana. Bahkan dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, *ma'qud alaih* tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan tidak belum ada, seperti dalam akad jual beli pesanan.

Menurut para ulama syarat *ma'qud alaih* itu ada di tempat dan bisa diserahkan terimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam jual beli salam tidak demikian. Oleh sebab itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam ini berdasarkan *istihsan* (sesuatu yang dianggap lazim dilakukan). Islam telah ditetapkan dalam rukun dan syarat jual beli agar dapat dikatakan sah menurut Islam jika telah terpenuhi syarat dan rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

1) Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) serta *ma'qud alaih* (objek akad).

Akad merupakan ikatan penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan bila sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul

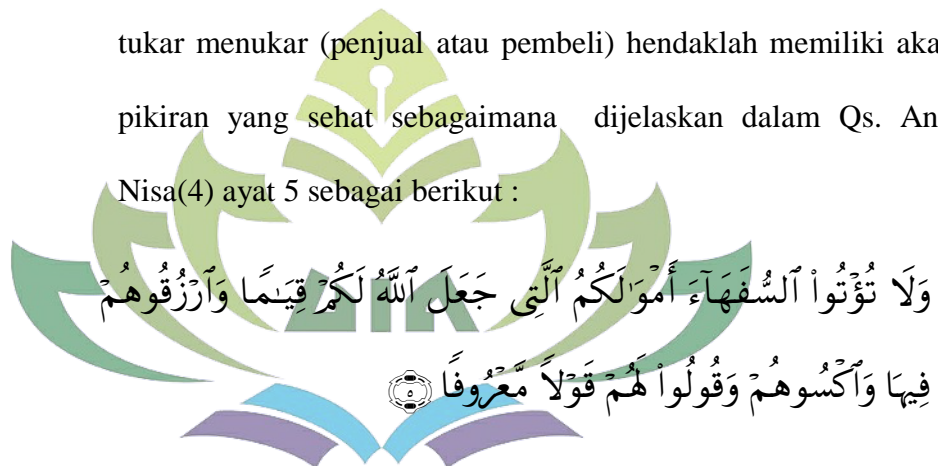
dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat, yang mengandung arti ijab dan kabul.¹⁵

2) Syarat Sah Jual Beli

Syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu:

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:¹⁶

1. Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual atau pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisa(4) ayat 5 sebagai berikut :



Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”¹⁷

2. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang

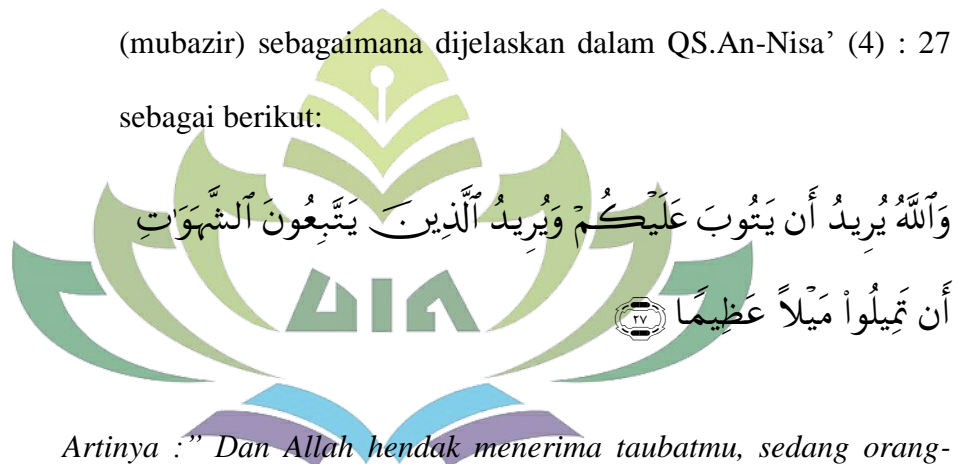
¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 70

¹⁶ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 28

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 61

membeli adalah kafir, maka mereka akan merendahkan dan menghina orang Islam dan kaum muslimin.

3. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.
4. Tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir) sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisa' (4) : 27 sebagai berikut:



Artinya :” Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).”¹⁸

Syarat di atas dapat menjadi garis besar bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat-syarat bagi penjual atau pembeli, bermaksud agar supaya dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara'. Maka apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli agar tidak merusak syarat dalam jual beli.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.283

5. Syarat *ma'kud alaih* barang yang diperjualbelikan antara lain:
- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi dan lain-lain.
 - b. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti anjing, babi, cicak dan lain-lain
 - c. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - d. Tidak dibatasi waktunya seperti ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh dan tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
 - e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.
 - f. Milik sendri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
 - g. Diketahui atau dilihat, barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, takarannya, beratnya, jenisnya, atau ukuran-ukuran lainnya.

6. Syarat sah ijab kabul

Ijab kabul merupakan pernyataan atau perkataan kedua belah pihak sebagai gambaran kehendaknya yang melakukan transaksi jual beli. Syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut: ¹⁹

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan).
 - b. Tidak diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
 - c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.
 - d. Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
 - e. Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak
- #### 7. Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama' fiqh membedakan antara *adhaman* dan *as-si'r*.

Adhaman merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu

¹⁹Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 148-149

harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Ulama' fiqh berpendapat syarat nilai tukar sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad.
- c. Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.²⁰

C. Jual Beli Yang Dilarang

Menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi jual beli yang dilarang sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli akad (penjual dan pembeli) antara lain sebagai berikut:
 - a) Jual beli orang gila

Bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk dianggap tidak sah, karena dipandang tidak berakal.

- b) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan.

²⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124-125

c) Jual beli *Fudhul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa pemilikinya, sehingga menurut para ulama' jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena mengambil hak orang lain (mencuri).

d) Jual beli orang buta

Menurut jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang bagus, dan menurut ulama' Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap tidak sah.

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, pemboros dan bodoh)

Jual beli ini dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *Malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya.

Jual beli yang seperti ini menurut ulama' tidak sah, sebab dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) sebagai berikut:

a) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah. Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidak pastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya.²¹ Dalam QS. Al-An'am ayat 152 dijelaskan sebagai berikut:



Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat²².

²¹ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tiinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-‘Adalah Vol, XII, No, 3, Juni 2015, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, h. 656

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.283

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh. Bisnis yang sifatnya gharar tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi barang waktu memperolehnya.

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Dalam *gharar* ini kedua belah pihak tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hajat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*).

Jika dilihat dari keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya gharar terbagi menjadi tiga:

1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma', seperti menjual ikan asin yang masih di dalam air dan burung yang masih di udara.
2. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma' seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya dikembalikan kepada kebiasaan.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, sebab jual beli seperti ini dianggap tidak mempunyai kejelasan yang pasti.

c) Jual beli *Majhul*

Jual beli barang yang tidak jelas misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Menurut jumhur ulama' jual beli seperti ini tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

d) Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا لَمْ يَنْهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفُخْلِ (رواه البخارى)²³

“Dari Ibnu Umar R.A berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang.

e) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Jual beli yang dimaksud adalah barang –barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

عَنْ جَابِرٍ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)²⁴

“Sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”.

f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas, hal ini sebagai mana sabda Nabi SAW:

“Dari Ibnu Umar R.A ia berkata: Nabi SAW, melarang menjual binatang yang sekarang sedang dikandung.”²⁵

g) Jual beli Muzabanah

Jual beli yang basah dengan buah yang kering, seperti jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, tetapi ukurannya

²³Shahih Bukhari: *Kitab At-Tijarah*, Juz 3, h. 74, bab 2

²⁴Shahih al-bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al- Mughirah al-Bukhari (194-256 H), Tahqiq Musthafadib alBugha, Daar Ibni Katsir, al Yamamah, Beirut Cet, III, Th. 1470 H/1987 M.

²⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 110

sama, sehingga dapat merugikan pemilik padi kering oleh karena itu jual beli ini dilarang.

h) Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli yang dimaksud adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau sawah, seperti jual beli yang dilarang oleh agama, yang mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

i) Jual beli *Mukhadarah*

Maksudnya jual beli buah-buahan yang belum dapat dipanen, seperti mangga yang masih kecil, rambutan yang masih hijau dan lain sebagainya. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena barang tersebut masih samar (belum jelas), yaitu bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, serta menimbulkan kekecewaan dari salah satu pihak.

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seperti seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka ia dianggap telah membeli kain tersebut. Jual beli ini dilarang oleh agama sebab mengandung tipuan dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

j) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli yang dilakukan secara lempar melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, lalu terjadi

lempar melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan yang dapat merugikan dari salah satu pihak.

3. Jual beli yang dilarang karena lafaz (ijab kabul)

a) Jual beli *Mu'athah*

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli ini dipandang tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual terhadap kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah sebab kemungkinan ada untuk meninggikan harga atau kualitas barang.

c) Jual beli *Munjiz*

Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak sah, sebab dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d) Jual beli *Najasyi*

Jual beli yang dapat dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, maksudnya dengan mempengaruhi orang agar mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini tidak sah karena dapat menimbulkan keterpaksaan.

e) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya yaitu menjual barang kepada orang lain melalui cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Seperti seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga murah dari harga tersebut. Jual beli ini dilarang oleh agama karena menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang), sebagai sabda Nabi SAW sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . م . وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)²⁶

“Rasulullah SAW bersabda seseorang tidak boleh menjual tas penjualan orang lain”.

f) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya jual beli yang dilaksanakan dengan menemui orang-orang (petani) desa sebelum orang tersebut masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tinggi nya.

Jual beli ini dipandang kurang baik atau dilarang, sebab dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Seperti seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang tinggi. Jual beli ini dilarang

²⁶Ibnu Hajar Al ‘Asqalani (Fath Al-Bari bisyarhi Shahi Al Bukhari) hadist 353

juga oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu:

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli ini merupakan jual beli yang melalui pesanan dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka lalu barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *Muqayadhah* (barteran)

Jual beli ini merupakan jual beli yang dilakukan dengan menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *Muthlaq*

Jual beli ini adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukarnya seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli ini dapat digunakan sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas.

Jual beli yang berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli menguntungkan (*al-murobbahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya.
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)

4. Jual beli al-musawah, yaitu penjual yang menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang melakukan akad saling meridhoi, jual beli ini lah yang berkembang sekarang.²⁷

E. Batalnya Jual Beli

Jual beli yang tidak mempunyai kecocokan dapat dibatalkan (*Iqalah*) dan hal ini disunnahkan apabila salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan hukum batalnya jual beli terbagi menjadi empat sebagai berikut:

1. Dipersilahkan, yaitu apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.
2. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* merupakan pembatalan jual beli pertama, sedangkan imam malik berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.
3. Pembatalan (*iqalah*) diperbolehkan apabila sebagian barang mengalami kerusakan.
4. Tidak diperbolehkan adanya kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*. Apabila terjadi kenaikan dan pengurangan harga maka *iqalah* tidak diperbolehkan padanya.

Pembatalan jual beli merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar jual beli didalamnya tidak ada yang dikecewakan, baik penjual maupun pembeli.²⁸

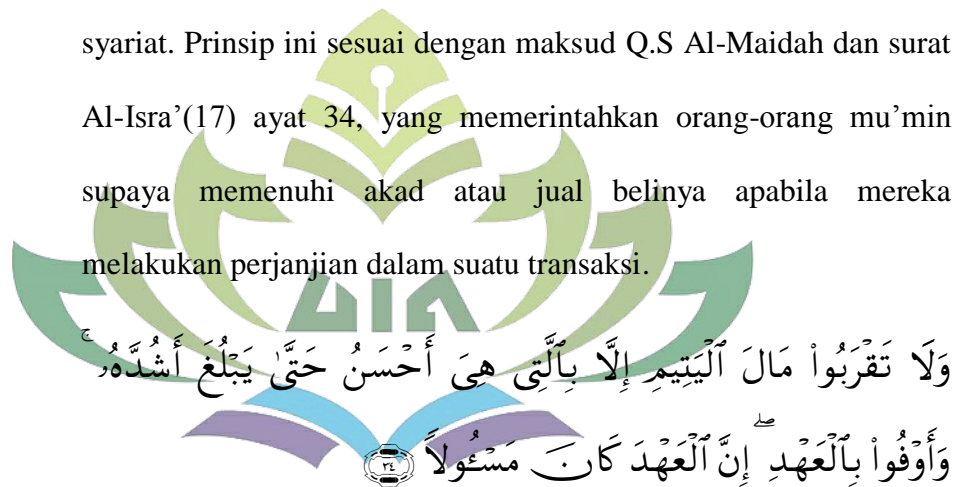
²⁷ Rahmad Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 101

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Graha Indonesia, 2012), h. 83

F. Prinsip-prinsip Muamalah

Terdapat prinsip-prinsip muamalah yang berada pada etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi dapat dilakukan. Prinsip-prinsip pada dasarnya menghendaki agar setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud Q.S Al-Maidah dan surat Al-Isra' (17) ayat 34, yang memerintahkan orang-orang mu'min supaya memenuhi akad atau jual belinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

³⁰”الْأَصْلُ فِي الْمَعَا مِلَّةِ الْإِبَابَا حَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁹ Nurfaizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013, UIN Suska Riau, h. 194

³⁰H.A Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalama Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30

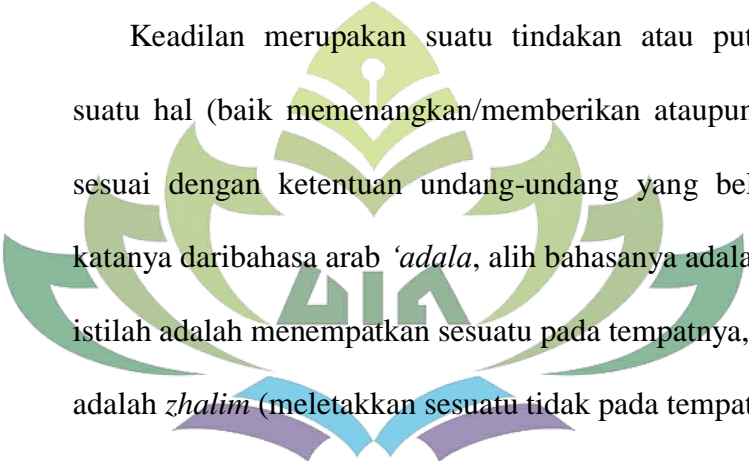
Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Dari kaidah diatas menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), wakalah, dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, riba dan mengarah kepada perjudian.

2. Butir-butir perjanjian dalam transaksi dirancang serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas dengan penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syariat dan adat setempat.
3. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
4. Pembuat hukum (*syar'i*) mewajibkan setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau yang dicurigai diberi hak *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
5. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada' *urf* atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya artinya peranan ini atau adat kebiasaan dengan bidang transaksi sangat menentukan selama syarat tidak menentukan lain oleh sebab itu ada yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah keduniaan, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.

Inti dari kelima prinsip diatas merupakan suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak yang melakukannya dilakukan secara bebas, bertanggung jawab dalam menentukan bentuk masing atas kedua belah pihak tanpa ada paksaan didasari atas niat yang baik dan kejujuran serta memenuhi syarat yang sudah biasa dilakukan. Selain prinsip di atas terdapat prinsip-prinsip muamalah yang lain yaitu:

1) Keadilan



Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan ataupun mrnjatuhkan) sesuai dengan ketentuan undang-undang yang belaku, adil asal katanya daribahasa arab '*adala*, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan katanya adalah *zhalim* (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya).

Dalam prinsip keadilan dimaksudkan agar pelaku usaha menetapkan harga sesuai dengan nilai tukar secara proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, bahkan diharapkan memiliki setandar yang pasti dari nilai produksi yang telah dikeluarkan. Dengan demikian konsumen mendapat harga secara adil, dalam adil secara proposional. Dalam persepektif Islam, pada dasarnya dalam sebuah perniagaan mengambil keuntungan berapapun tidak dibatasi, asalkan terdapat adanya unsur kerelaan yang telah terpenuhi.

Berkenaan dengan masalah keadilan, nash-nash dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.³¹

2) Tidak ada unsur riba dan *gharar*

Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT QS. Ar-Rum(30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³²

Kata *gharar* merupakan khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Konsep *gharar*,

³¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) h. 76

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 326

dibagi menjadi dua, pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidak pastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dijelaskan dalam QS. Al-An'am (6) ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."³³

G. 'Urf (Adat Kebiasaan)

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³⁴ 'Urf (tradisi) merupakan bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah

³³ Ibid. h.117

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*

Fiqh, (Jakarta: Amzah, Cet ke-2,2011), h.209

masyarakat.³⁵ *Urf* juga disebut dengan sesuatu yang terkenal di kalangan umat manusia selalu di ikut, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.³⁶ Ulama' *Ushuliyin* memberikan definisi:

“ Apa yang bisa dimengerti manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan, perbuatan dan pantangan-pantangan”.³⁷

Dalam disiplin Ilmu Fiqh ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat di definisikan sebagai sesuatu non rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidur. Kemudian *'urf* diartikan sebagai kebiasaan.

العادة محكمة atau kebiasaan (tradisi) adalah salah satu hal yang memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya transformasi hukum syar'i. Di atas kebiasaan (tradisi) ini, banyak terbangun hukum fiqh dan Qa'idah-Qa'idah *furu'*.³⁸

Menurut Al-Zarqa *Al-Adat* adalah suatu kebiasaan baik yang berlaku secara umum (*adat al-'am*) atau berlaku secara khusus (*adat-al-khash*) bisa dijadikan penentu dalam menetapkan hukum syar'i, yaitu hukum *syar'i* yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Apabila dalil-dalil nash tidak berseberangan

³⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet ke-14, 2011), h.416

³⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 2008), h.110

³⁷ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, Cet ke -1,2008), h.110

³⁸ Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h.155

sama sekali dengan suatu kebiasaan maupun tradisi, atau berseberangan namun hanya secara umumnya saja, maka kebebasan tersebut bisa diterima sebagai hukum *syar'i*.³⁹

Maksud dari istilah "*adat al-am*" adalah kebiasaan yang berlaku secara luas dan mendominasi pada semua daerah, seperti kebiasaan mereka dalam melakukan adat *istishna*. Sedangkan yang dimaksud" adat "*al-khash*", adalah kebiasaan yang berlaku dan mendominasi pada sebagian daerah.

Ibnu Abidin mengatakan bahwa *al-adat* merupakan salah satu dalil (hujjah) *syar'i* terhadap masalah-masalah yang tidak tercover oleh nash. Ia juga mengutip pernyataan yang mengatakan bahwa membangun hukum berdasarkan adat yang *dzohir* adalah suatu kewajiban. Demikian apabila tidak ada nash-nash yang secara khusus menentanginya. Jika ada nash yang secara khusus menentanginya, maka posisi nash jelas mengalahkan adat, baik adat yang 'am atau yang khash, karena nash lebih kuat dari pada (*'urf*).⁴⁰

'*Urf* secara teminologi menurut Dr. Ramad Dahlan yaitu sesuatu menjadi kebiasaan manusia, mereka mengikutinya dalam bentuk setian perbuatan yang populer diantara mereka ataupun satu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan

³⁹*Ibid*,h.163

⁴⁰*Ibid*, h.167

dalam etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahami dalam pengertian lain.⁴¹

Al-'Adah/ al-'Urf adalah sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*uli-al-bab*) dan mereka tidak mengingkarinya.⁴²

Menurut Imam al-Qurtubi bahwa *Al-urf*, *al-ma'ruf*, dan *al-arifah* adalah suatu kebiasaan (perilaku baik), yang dilakukan oleh masyarakat, di mana akal merelakan dan hati merasa nyaman terhadapnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian '*urf*' bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan definisi kata. '*Urf* secara terminologi berarti suatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia baik berupa perbuatan dan ucapan. Sedangkan dalam definisi kata yaitu ada dua kata menurut mayoritas ulama adalah '*urf*' dan *adat* keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit*, h.209

⁴² Ahmad Sudirman, *Op.Cit*, h.165

2. Macam-macam 'Urf

Para ulama ushul membagi 'urf menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya 'urf dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk kebiasaan.

- 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁴³

- 2) Kebiasaan yang berbentuk (*al-'urf al-amal*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan merupakan kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

- b. Dari segi cakupannya 'urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

- 1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan negara.

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2(Jakarta: Kencana, 2011),h.389

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa '*urf*' ini ('*urf*'*am*) dapat mengalahkan qiyas, kemudian dinamakan istihsan '*urf*'. '*Urf*' ini dapat men-takhsis nash yang '*am*' yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Diantara meninggalkan keumuman dari nash *zhanni* karena adanya '*urf*' yaitu larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi '*urf*' (tradisi).

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu '*urf*' yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu misalnya kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. '*Urf*' semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang *illat-nyaditemukan* tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa nash yang *illat-nya* ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan dianggap rusak.

1) Kebiasaan dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*(ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka atau tidak pula meninggalkan *madarat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* serta kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*, seperti dikalangan pedagang yang menghalalkan riba, misalnya peminjaman uang antar sesama pedagang.

Dan praktik ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliah yang dikenal dengan sebutan riba *al-nasi'ah* (riba yang muncul dari pinjam meminjam. Oleh sebab itu menurut ulama ushul fiqh dalam kategori *al-urf al-fasid*.

3. Syarat-syarat '*Urf*

- a. '*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis.

Syarat merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang sah. Sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, apabila '*urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat logika, maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*, atau minimal kalangan sebagian besar masyarakat.

- c. '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Berarti '*urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum.

- d. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Misalnya, kebiasaan suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri.⁴⁴

⁴⁴Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet ke-1,2005), h.156

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Secara Geografis, desa Sukaraja berada dikecamatan Buay Madang sekitar kurang lebih 18 km kearah Timur dari kabupaten Oku Timur, yang terletak diantara 104 derajat 27 bujur Timur 4 derajat 15 lintang Selatan dengan ketinggian 65 m di atas permukaan air laut. Desa yang cukup produktif dan potensi sumber daya alam yang belum banyak tergali terutama pertanian, perkebunan dan perikanan.

Secara administrasi desa Sukaraja dibagi menjadi 5 dusun dan 17 RT dengan luas wilayah 525 Ha. Adapun batas-batas administrasi desa Sukaraja adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Aman Jaya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sukaraja Tuha dan Kurungan Nyawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bandar Jaya dan Pemetung Basuki.
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kurungan Nyawa II.

Adapun jumlah penduduk desa Sukaraja adalah: 4.205 jiwa dengan perincian penduduk laki-laki: 2.199 jiwa dan perempuan: 2.006 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga: 1.104 KK dengan KK miskin tercatat 142 KK.

1. Keadaan Sosial Ekonomi

Dari segi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sukaraja mayoritas profesinya sebagai petani dan pedagang yang beerjumlah 2.201 dan 1.101 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Tingkat Ekonomi Masyarakat

No	Ekonomi Masyarakat	Jumlah
1.	Mampu	30%
2.	Sedang	40%
3.	Kurang Mampu	17%
4.	Miskin	13%
Jumlah		100%

Tabel 2
Jumlah Mata Pencaharian Penduduk

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2.201
2.	Pedagang	1.101
3.	Wiraswasta	400
4.	PNS	50
5.	Buruh	100
Jumlah		3.852

2. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang terpenting dalam setiap daerah, karena dengan memiliki sarana pendidikan dapat mengasah ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Adanya pendidikan mampu untuk merubah rendahnya pola pikir di dalam

masyarakat, karena itu sarana pendidikan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat untuk lebih baik lagi.

Masyarakat Desa Sukaraja sebagian besar pendidikannya hanya sampai tamatan Sekolah Dasar (SD), namun sekarang sudah banyak tingkat kelulusan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) dan ada juga Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP).

Tabel 3
Jumlah Sarana Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	TK/RA	2
2	SD/MI	2
3	SMP/MTs	3
4	SLTA/MA/SMK	4
5	Perguruan Tinggi	1

Tabel 4
Jumlah Pendidikan Non Formal

No	Pendidikan Non Formal	Jumlah
1	PAUD	1
2	TPA/TPQ	4
3	Pondok Pesantren	2

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Seluruh penduduk yang ada di Desa Sukaraja mayoritas memeluk agama Islam. Desa Sukaraja memiliki masjid sebagai sarana tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya seperti memperingati hari-hari Islam seperti Isra' Mi'raj, Maulud Nabi Muhammad SAW dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.190
2.	Kristen	10
3.	Katholik	5
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Khonghucu	0
Jumlah		4.205

B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Tembak

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain.

Penjual bibit ikan lele menggunakan sisa tanah yang ada di samping rumah atau halaman yang tidak terpakai kemudian dimanfaatkan untuk membuat kolam sederhana yang digunakan untuk pembibitan maupun pembesaran bibit ikan lele. Kesepakatan atau perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa adanya catatan atau kwitansi karena akad atau jual beli tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama yaitu saling percaya.

Di desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur terdapat beberapa orang yang menekuni bisnis rumahan, salah satunya dengan menjual bibit ikan lele dengan memelihara ikan lele, lalu ikan lele tersebut dijadikan sebagai indukan untuk diambil telornya dan dijadikan sebagai bibit ikan lele, kemudian dijual kepada para konsumen.

Orang yang menjalankan budidaya ikan lele sangat senang karena pemeliharaannya sangat mudah dimulai dari perolehan bibit ikan lele sampai perawatannya. Hal ini disebabkan karena penjual bibit ikan lele tersebut menjadikan usahanya sebagai usaha sampingan sekaligus sebagai hobi.

Bibit ikan lele sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya ikan lele, karena semakin bagus bibit yang akan ditebar maka peluang sukses semakin terbuka lebar. Di desa Sukaraja penjual bibit ikan lele memilih membeli bibit ikan lele di Metro (Lampung) dengan cara memesan dan diantarkan ke desa Sukaraja, hal ini dilakukan agar dalam budidaya bibit ikan lele lebih cepat dan tidak susah payah dalam memperoleh bibit ikan lele serta disisi lain harganya lebih murah walaupun bibit ikan lele tersebut diantar, dengan cara jual beli dengan jumlah yang besar.

Budidaya bibit ikan lele dilakukan penjual tersebut dikolam-kolam yang khusus untuk tempat budidaya bibit ikan lele dengan menggunakan kolam yang berdinding tembok, kolam yang terbuat dari terpal serta kolam yang dibuat dengan menggali tanah dengan menggunakan ukuran tertentu.

Bibit ikan lele yang dijual tersebut diperoleh dari proses pembibitan yang baik kemudian bibit ikan lele dijual kepada pembeli yang membutuhkan dalam jumlah yang besar atau kecil. ¹

1. Subyek Jual Beli

a. Pihak Penjual

Pihak penjual bibit ikan lele dalam hal ini adalah orang dewasa yang sudah lama menekuni bisnis ini sehingga sudah terbiasa dalam proses akad jual beli bibit ikan lele. Dalam proses penjualan bibit ikan lele pihak penjual biasanya melayani pembeli dengan sikap yang ramah, jujur dan sopan sehingga penjualannya berkembang cepat ke berbagai tempat khususnya di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur.

Adapun pihak penjual tidak merasa keberatan dan dirugikan dalam proses jual beli ini mulai dari mengatur pesanan, akad berlangsung dan sampai akad jual beli selesai.²

b. Pihak Pembeli

Pihak pembeli dalam hal ini merupakan orang dewasa yang sudah terbiasa dalam proses jual beli bibit ikan lele. Pihak pembeli dalam hal ini adalah orang dewasa yang sudah lama menekuni bisnis ini sehingga sudah terbiasa dalam proses akad jual beli bibit ikan lele ini.

¹ Bahrudin (penjual bibit ikan lele), Wawancara, Sukaraja, 7 Mei 2019

² Bahrudin (Penjual bibit ikan lele), wawancara, Sukaraja, 7 Mei 2019

Dalam proses pembelian bibit ikan lele ini pihak pembeli merasa dilayani dengan sikap, ramah, jujur dan sopan oleh penjual sehingga masyarakat di desa Sukaraja Kec. Buay Madang, Kab. Oku Timur sudah percaya karena merasa tidak akan tertipu oleh pihak pembeli.³

2. Obyek Jual Beli

Obyek jual beli ini adalah bibit ikan lele dengan ukuran tertentu, mulai ukuran 0,5 cm sampai ukuran 5 cm. Bibit ikan lele diambil dari pembibitan yang sudah menjadi proses tertentu sampai dijual sehingga bibit tersebut mudah diperoleh pembeli mengingat para produsen bibit ikan lele sudah terbiasa menekuni bisnis ini.

Sedangkan bibit ikan lele yang diperjualbelikan diantar setelah pihak penjual mendapat pesanan sehingga bibit ikan lele harus segera sampai tujuan kepada pihak pembeli mengingat bibit ikan butuh tempat dan proses pernafasan yang luas agar bibit ikan lele tidak mengalami kerugian yang banyak.⁴

3. Akad Jual Beli

Akad jual beli bibit ikan lele dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dan saling sepakat antara kedua pihak. Bibit ikan lele tersebut dibeli dalam jumlah ribuan sampai puluhan ribu. Adapun bibit ikan lele tersebut diperoleh pembeli dari daerah desa Sukaraja dengan cara memesannya. Maka dari itu penjual

³ Imam Hanafi (Pembeli bibit ikan lele), Wawancara, Sukaraja, 8 Mei 2019

⁴ M. Ali Sofyan (Pembeli bibit ikan lele), Wawancara, Sukaraja 9 Mei 2019

dan pembeli sepakat menghitungnya dengan cara praktis agar supaya bibit ikan lele tidak mengalami stres dan memakan waktu lama.

Jual beli bibit ikan lele di desa Sukaraja Kecamatan. Buay Madang Kabupaten. OKU Timur menggunakan sistem tembak yaitu hitungan awal yang ditimbang lalu dari hasil timbangan tersebut dijadikan patokan untuk hitungan selanjutnya. Dalam kasus tersebut pihak penjual dan pembeli dalam praktek perhitungan bibit ikan lele telah sepakat menggunakan sistem tembak yaitu timbangan yang pertama mereka jadikan patokan untuk timbangan selanjutnya, walaupun dalam takaran selanjutnya hitungannya dianggap sama.

Pihak penjual dan pembeli sudah terbiasa dengan menggunakan sistem tembak tersebut, hal ini dilakukan oleh masyarakat desa Sukaraja Kecamatan. Buay Madang Kabupaten. OKU Timur karena dengan sistem tembak tersebut pihak penjual dan pembeli tidak merasa keberatan dalam akad jual beli ini sehingga lebih memudahkan menggunakan cara seperti ini. Dilain sisi penjual dan pembeli tidak merasa ada yang dirugikan.

Menurut pembeli mengatakan bahwa jika jual beli bibit ikan lele ini yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu tersebut dihitung perekor, maka tidak mampu untuk menghitungnya dan menyita waktu yang lama dalam proses menghitungnya. Sehingga akan menyebabkan bibit ikan lele cepat stres dan mati.⁵

⁵ M. Tohirin (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Sukaraja 9 Mei 2019

Berikut ini data penjual dan pembeli bibit ikan lele berikut hasil wawancara kepada penjual dan pembeli bibit ikan lele di desa Sukaraja Kec.Buay Madang Kab.OKU Timur :

1. Penjual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber terkait jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur. Berikut informasi narasumber antara lain:

Tabel 6
Data Penjual Bibit Ikan Lele di Desa Sukaraja

No.	Nama Penjual	Alamat
1.	Bahrudin	Sukaraja

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bahrudin pada hari Selasa (7/5) beliau memulai usaha pembibitan sudah 8 tahun lamanya, usaha ini sebagai usaha sampingan karena bisnis ini lumayan menguntungkan. Beliau mendapatkan bibit ikan lele dari indukan lele pertanian Metro. Selain itu perawatannya pun cukup mudah, menurut beliau bibit ikan lele siap dijual saat umur 5-6 minggu dan dijualnya tidak menentu jumlahnya dan bibit tersebut diambil oleh para petani.

Jual beli bibit ikan lele dalam menggunakan sistem tembak pada awalnya menggunakan takaran gelas untuk menghitung jumlah bibit ikan lele tetapi menurut beliau cara tersebut kurang praktis sehingga beliau berinisiatif menggunakan sistem tembak. Hitungan pertama dijadikan sebagai patokan hitungan selanjutnya. Adapun akibat jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem tembak menurut beliau telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika ada yang komplain akibat bibit ikan lele yang kurang cara menyelesaikannya dengan memberikan tambahan bibit ikan lele di akhir proses jual beli.⁶

2. Pembeli (konsumen)

Terdapat 9 (sembilan) konsumen atau narasumber dari praktek jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur antara lain sebagai berikut:

Tabel 7

Data Pembeli Bibit Ikan Lele di Desa Sukaraja

No.	Nama Pembeli	Alamat
1.	M. Ali Sofyan	Sukaraja
2.	Muhammad Yusuf	Sukaraja
3.	Heru Prasetya	Muara Dua
4.	Ahmad Roji'in	Sukaraja
5.	Anam Rosadi	Sukaraja
6.	Sutikno	Muara Dua
7.	Imam Hanafi	Muara Dua

⁶ Bahrudin (Penjual Bibit Ikan Lele), Wawancara, Sukaraja 7 Mei 2019

8.	M.Tohirin	Pemetung Basuki
9.	Muhammad Husen	Muara Dua

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak M Ali Sofyan pada hari kamis (9/5), beliau sering membeli bibit ikan lele dan itupun sudah sebagai langganan tetap. Beliau biasanya membeli bibit ikan lele sebanyak 3000 ekor bibit ikan lele. Beliau setuju apabila dalam menghitung jumlah bibit ikan lele menggunakan sistem tembak karena lebih praktis jika dihitung satu persatu sangat merepotkan. Ketika sesampai di rumah beliau tidak merasa dirugikan dan tidak pernah menghitung ulang karena sudah langganan. Ketika membeli bibit ikan lele tidak sesuai jumlahnya ada tambahan 1 takaran lagi.⁷

Selanjutnya penulis mewancarai Bapak M Yusuf pada hari kamis (9/5) beliau biasanya memesan bibit ikan lele sebanyak 500 ekor bibit ikan lele. Jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak beliau setuju karena yakin tidak unsur kecurangan di dalamnya. Beliau juga tidak merasa dirugikan dan tidak pernah menghitung lagi bibit ikan lele yang sudah dibeli apabila bibit ikan lele jumlahnya kurang beliau tidak komplain dan memakluminya.⁸

⁷M. Ali Sofyan (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

⁸ M. Yusuf (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

Selanjutnya penulis juga mewancarai kepada Bapak Heru Prsetya pada hari Kamis (9/5) beliau sering membeli bibit ikan lele. Biasanya beliau membeli bibit ikan lele sebanyak 2000 ekor bibit ikan lele. Dalam jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak beliau setuju apabila bibit ikan lele dihitung satu persatu dibutuhkan waktu yang lama. Ketika bibit sudah sampai di rumah beliau tidak menghitung kembali bibit ikan lele yang sudah dibeli, jika ada yang kurang saya sedikit kecewa namun memakluminya.⁹

Selanjutnya penulis mewancarai Bapak Ahmad Rojiin pada hari Kamis (9/5) beliau sering membeli 3000 bibit ikan lele. Ketika membeli bibit ikan lele beliau langsung membeli ditempat dan langsung melihat perhitungannya. Dalam proses jual beli bibit ikan lele beliau setuju dengan menggunakan sistem tembak karena cara menghitungnya lebih simpel dan praktis. Beliau juga merasa tidak dirugikan apabila sesampainya di rumah beliau menghitung kembali bibit ikan lele jika ada yang kurang beliau memakluminya.¹⁰

Selanjutnya penulis mewancarai Bapak Anam Rosadi pada hari Kamis (9/5) beliau membeli bibit ikan lele sebanyak 1000 ekor bibit ikan lele. Beliau setuju apabila dalam jual beli menggunakan sistem tembak karena lebih praktis dibandingkan dengan cara hitungan per ekor yang membutuhkan waktu lama. Beliau juga

⁹ Heru Prasetya (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

¹⁰ Roji'in (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

tidak merasa dirugikan dan tidak pernah menghitung kembali bibit ikan lele sesampainya dirumah.¹¹

Dalam wawancara selanjutnya penulis mewancarai Bapak Sutik pada hari kamis (9/5) beliau membeli bibit ikan lele sebanyak 3000 ekor bibit ikan lele. Beliau setuju dengan menggunakan sistem tembak karena cara menghitungnya lebih praktis dan beliau tidak merasa dirugikan karena sesampainya dirumah beliau menghitung kembali jumlah bibit ikan lele apabila ada yang kurang jumlah bibit ikan lele beliau komplain kepada penjual bibit ikan lele.¹²

Selanjutnya penulis mewancarai Bapak Imam Hanafi pada hari kamis (9/5) beliau membeli bibit ikan lele sebanyak 2000 bibit ikan lele. Beliau setuju dengan penggunaan sistem tembak karena cara menghitung jumlah bibit ikan lele lebih praktis, beliau juga tidak merasa dirugikan. Sesampainya dirumah beliau tidak pernah menghitung kembali jumlah bibit ikan yang dibeli apabila ada yang kurang beliau memaklumi.¹³

Selanjutnya penulis mewancarai Bapak M Tohirin pada hari kamis (9/5) beliau membeli sebanyak 2000 bibit ikan lele. Beliau juga setuju dengan sistem tembak karena menghitung jumlah bibit ikan lele satu persatu membutuhkan waktu yang lama sehingga sistem tembak disini menjadi praktis. Beliau tidak merasa dirugikan dan tidak pernah menghitung kembali bibit ikan lele

¹¹Anam Rosadi (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

¹²Sutik (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

¹³Imam Hanafi (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

yang dibeli apabila ada yang kurang wajar karna tidak menghitung satu persatu.¹⁴

Selanjutnya dalam mewawancarai Bapak M. Husen pada hari Kamis (9/5), beliau biasanya sering membeli bibit ikan lele sebanyak 2500 bibit ikan lele. Dalam jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem tembak beliau setuju, karena tidak memungkinkan jika dihitung satu persatu. Beliau juga tidak merasa dirugikan dan sesampainya di rumah tidak menghitung ulang jumlah bibit ikan lele yang dibeli. Jika ada yang kurang jumlah bibit ikan lele yang sudah dibeli beliau sedikit namun memakluminya.¹⁵

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini para pihak yang berakad sepakat dan saling rela dalam jual beli bibit ikan lele menggunakan sistem tembak. Sistem dan mekanisme jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak menggunakan hitungan awal yang ditimbang untuk dijadikan patokan hitungan selanjutnya, karena sudah dianggap sama jumlah hitungannya. Tetapi setelah selesai menghitung semua bibit ikan lele diakhir ditambah lagi untukantisipasi jika ada kekurangan bibit ikan lele terhadap pihak pembeli.

¹⁴ M. Tohirin (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

¹⁵ M. Husen (Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Muara Dua 9 Mei 2019

C. Pertimbangan Praktis Digunakannya Sistem Tembak Oleh Penjual

Adapun dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Bahrudin pada tanggal 07 Mei 2019, beliau memulai usaha pembibitan mulai tahun 2010, usaha ini mudah dan sangat menguntungkan. Adapun proses maupun cara mendapatkan bibit ikan lele itu dengan membeli dari penjual yang lain. Lalu tempat untuk bibit harus rajin selalu dibersihkan dan bibit lelenya dipisahkan sesuai dengan ukurannya.¹⁶

Terdapat kendala dalam jual beli bibit ikan lele seperti bibit ikan lele yang mati dan stres, kebanyakan yang membeli bibit ikan lele sudah menjadi langganan jadi antara penjual dan pembeli itu sudah saling percaya dan sepakat. jika dalam jual beli ini terdapat perselisihan dalam hitungan, sikap penjual disini menambahkan satu takaran atau lebih semisal terdapat bibit ikan lele yang kurang, sehingga kebanyakan resiko yang terjadi ditanggung dari pihak pembeli. Dalam menentukan harga sesuai dengan kesepakatan, yang awalnya menggunakan hitungan perekor namun, karena jumlah pesanan yang banyak maka menggunakan sistem tembak yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses perhitungannya dan agar lebih praktis.

Pertimbangan praktis digunakannya sistem tembak, karena bibit ikan lele tersebut dibeli dalam jumlah ribuan sampai puluhan ribu apabila cara menghitung bibit ikan lele dengan menggunakan cara manual (satu persatu), mengakibatkan bibit ikan lele tersebut stres dan adapula yang

¹⁶ Bahrudin (Penjual Bibit Ikan Lele), Wawancara, Sukaraja 7 Mei 2019

mati. Maka penjual berinisiatif untuk menghitung bibit ikan lele dengan cara yang cepat dan praktis (sistem tembak) agar bibit ikan lele tetap bisa hidup dan tidak mengalami stres.

D. Sikap Pembeli Terhadap Penggunaan Sistem Tembak

Dalam praktek jual beli bibit ikan lele yang terjadi terutama sikap pembeli yang sudah memaklumi transaksi jual beli bibit ikan lele yang terjadi di tempat tersebut walaupun setiap transaksinya sering terdapat kekurangan, karena menurut pembeli itu sudah menjadi resikonya, seperti bibit ikan lele yang mati atau jumlah pesanan yang tidak sesuai kurang/lebih.¹⁷

Sebab pelaksanaan jual beli bibit ikan lele ini menggunakan sistem tembak yang berarti timbangan yang pertama mereka jadikan patokan untuk timbangan selanjutnya, walaupun dalam takaran selanjutnya hitungannya tidak bisa dipastikan jumlahnya sama. Dalam hal terdapat unsur ketidakpastian dalam praktek dan mekanisme jual beli yang telah ditentukan Islam. Karena adanya ketidaksamaan dalam proses perhitungan atau patokannya.

Dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan lele ini menggunakan patokan bukan per ekor dan dalam perhitungannya disesuaikan dengan patokan pertama. Padahal jika menggunakan sistem tembak, jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah patokan yang pertama. Dari praktek ini mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak baik dari penjual maupun

¹⁷Imam Hanafi,(Pembeli Bibit Ikan Lele), Wawancara, Pada Tanggal 9 Mei 2019

pembeli karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan terutama bagi pembeli.



BAB IV

ANALISA DATA

Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Tembak di Desa Suka Raja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah SWT dan terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam dapat dilihat dari segi akad, penyerahan barang, dan barang yang diperjual belikan. Dalam islam tidak memeperbolehkan apabila dalam jual beli terdapat kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjual belikan serta hal yg memicu ketidakadilan.

Islam juga menghendaki agar dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan lele dengan sitem tembak senantiasa memperhatikan ketentuan ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan rukun dan syrat.

Perkembangan zaman pada saat ini telah menimbulkan tata cara yang baru dalam bertransaksi dengan berbagai macam objek. Kehidupan manusia selalu dinamis disebabkan selalu mengalami perubahan dalam mengikuti perkembangan zaman. Hukum juga harus selalu dinamis agar tetap dipatuhi, karena hukum Islam merupakan hukum yang sangat fleksibel dan luas. Meskipun tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist,

tetapi hukum Islam memiliki, penetapan hukum seperti halnya ijma' dan qiyas.

Kebutuhan manusia saat ini juga selalu bertambah dan beranekaragaman, untuk pemenuhan kebutuhan itu dianjurkan untuk berusaha. Perkembangan model transaksi jual beli saat ini memiliki banyak ragam yang pastinya membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam meskipun secara dasarnya semua bentuk transaksi itu boleh.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dalam syariat Islam tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit, namun hanya menyampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti halnya di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah Membolehkan adanya jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dikatakan sah apabila tidak mengandung unsur riba, jika jual beli mengandung riba berarti jual beli dikatakan batal. Allah melarang orang yang melakukan usaha untuk meperoleh harta dengan cara yang batil dengan berbagai macam bentuk transaksi.

Jual beli bibit ikan lele di Desa Sukaraja Kecamatan. Buay Madang Kabupaten. OKU Timur dapat dilihat dari segi aspek jual belinya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam hukumnya sah.

Praktek jual beli bibit ikan lele yang dilakukan dengan cara sistem tembak yang terjadi di Desa Sukaraja Kecamatan. Buay Madang, Kabupaten. OKU Timur dapat dilihat dari segi praktek jual belinya sudah

memenuhi rukun jual beli sesuai dengan agama Islam yaitu adanya seorang penjual bibit ikan lele dan beberapa pembeli, ada *sighat*(lafal *ijab* dan *qabul*) yang artinya berarti mereka sepakat melakukan jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak dengan harga tertentu.

Dalam jual beli, selain rukun yang harus dipenuhi harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Syarat –syarat jual beli dalam praktek jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem tembak yang terjadi di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur di jelaskan sebagai berikut:

1. Subyek jual beli

Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem tembak yang terjadi di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab.OKU Timur bahwa penjual dan pembeli tersebut adalah orang dewasa yang berakal dan sudah terbiasa dalam praktek jual beli bibit ikan lele tersebut. Pihak pembeli maupun penjual telah bersepakat dan rela serta tidak ada unsur keterpaksaan dari penjual dan pembeli, sebaliknya merasa senang dalam transaksi jual beli bibit ikan lele tersebut.

2. Syarat yang terkait ijab dan qabul

Praktek jual beli ikan lele dengan menggunakan sistem tembak yang terjadi di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur tersebut baik dari pihak penjual maupun pembeli telah sepakat melakukan jual beli dengan saling rela sehingga ijab dan qabul tiiddak

terdapat adanya unsur keterpaksaan dan unsur kelicikan sama sekali sehingga ijab dan qabul menurut ajaran Islam adalah sah.

3. Objek jual beli

Jual beli bibit ikan lele yang terjadi di desa Sukaraja abjeknya sendiri yaitu bibit ikan lele yang cara pemerolehannya, zat, bentuk, manfaat, penyerahannya, ukuran dan sifat-sifatnya yang jelas, maka sudah memenuhi syarat dari segi objeknya.

Adapun praktek jual beli bibit ikan lele yang terjadi dalam kasus ini adanya bentuk dari kerusakan yang harus dihindari yaitu demi kelangsungan bibit ikan lele yang memerlukan penanganan cepat sehingga jika perhitungan bibit ikan lele itu dihitung ekor perekor tentu mengakibatkan rusaknya kelangsungan hidup bibit ikan lele itu sendiri serta perlu adanya penanganan yang halus, akurat dan cepat agar dapat terjaga dan menghindari kerugian yang ditimbulkan dari kematian bibit ikan lele akibat stres dalam proses perhitungan ekor per ekor.

Di lain sisi apabila dalam jual beli bibit ikan lele tersebut di hitung ekor per ekor, maka akan menyusahkan dalam praktek jual beli bibit ikan lele sendiri, dalam kenyataannya di lapangan penjual tidak mampu untuk menghitungnya dikarenakan objek jual belinya berukuran kecil dalam jumlah ribuan sampai puluhan ribu.

Dalam praktek jual beli bibit ikan lele ini mereka menggunakan sistem tembak untuk mempermudah cara menghitungnya dan mereka tidak memastikan untuk perhitungan timbangan selanjutnya sebagai

hitungan yang pasti tetapi mereka hanya memperkirakan bahwa jumlah timbangan selanjutnya sama dengan jumlah timbangan yang pertama.

Seperti halnya jual beli bibit ikan lele yang terjadi di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur merupakan salah satu cara transaksi muamalah dalam bentuk jual beli yang harus diberikan kemudahan di dalam prakteknya dan tidak harus menggunakan dengan cara seperti itu jika dalam keadaan sulit tetapi dalam keadaan normal tetap dalam syariat Islam.

Praktek jual beli bibit ikan lele menggunakan sistem tembak di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur merupakan suatu kebiasaan yang sudah dijalani oleh penjual dan pembeli bibit ikan lele yang melakukan transaksi sehingga sudah menjadi kebiasaan.

'*Urf*' dalam jual beli tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena kebiasaan ini tidak terdapat adanya unsur kedholiman sama sekali bahkan pihak penjual dan pembeli merasa senang dalam menggunakan sistem tembak ini. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa '*urf*' ini bukan '*urf*' yang fasid tetapi '*urf*' yang shohih.

Dalam praktek jual beli bibit ikan lele di desa Sukaraja peneliti amati dari hasil wawancara menyatakan bahwa jual beli bibit ikan lele dilakukan menggunakan sistem tembak dengan cara mengambil bibit ikan lele dengan alat penyaring, kemudian dilakukan proses perhitungan ekor perekor untuk ditimbang, lalu jumlah hitungan yang telah ditimbang tersebut menjadi patokan untuk timbangan-timbangan selanjutnya. Hal ini

bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, serta menyelamatkan kelangsungan bibit ikan lele sehingga bibit ikan lele tidak cepat mati dan stres.

Praktek perhitungan bibit ikan lele tidak terdapat unsur kedholiman sama sekali karena konsep sisitem tembak tersebut tidak ada unsur riba atau unsur *gharar* karena tidak ada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist yang melarang hal tersebut. Sedangkan sistem tembak sendiri tidak ada masalah tentang hukumnya asal dilakukan dengan adil.

Dalil-dalil di atas diketahui bahwa jual beli bibit ikan lele yang terjadi di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dan para pendapat ulama' fiqh.

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam karena kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli sepakat dan saling rela apabila terdapat kekurangan atau bibit lele yang mati ada pilasi kematian yaitu ada tambahan bibit ikan lele.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktek jual beli bibit ikan lele yang terjadi di desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur yang menggunakan sistem tembak, dalam kasus tersebut pihak penjual dan pembeli dalam praktek perhitungan bibit ikan lele yang dipesan pembeli sudah sepakat dengan menggunakan sistem tembak yaitu, hitungan awal dihitung, lalu dari hasil hitungan tersebut ditimbang, hasil timbangan tersebut dijadikan acuan untuk disamakan jumlahnya dengan hitungan yang pertama. Pejual dan pembeli sepakat memperkirakan jumlah bibit ikan lele pada hitungan selanjutnya sama dengan jumlah bibit ikan lele pada hitungan yang pertama.

2. Menurut pandangan hukum Islam jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak boleh (di benarkan) karena dalam prakteknya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktek jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak yang sudah mentradisi dan disepakati, tidak ada tipu menipu dan saling rela. Digunakannya sistem tembak didasarkan atas pertimbangan praktis dan *masalah* dimana bibit ikan lele dalam penanganannya diperlakukan dengan cepat agar terjaga kelangsungan hidup.

Maka peneliti disini menyimpulkan kebolehan jual beli ini berdasarkan penelitian lapangan dan analisis dari hukum Islam.

B. SARAN

1. Bagi para penjual bibit ikan lele dengan menggunakan sistem tembak agar tidak takut melakukan jual beli dengan cara tersebut terkait dengan keharamannya, sebab praktek tersebut dibolehkan dalam hukum Islam. Agama Islam tidak mempersulit, tetapi malah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.
2. Pihak yang terlibat dalam jual beli ikan lele, agar senantiasa tetap berpegang teguh terhadap aturan jual beli yang berlaku dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, *Kitab Musnad: Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Hadist Nomor: 3494
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)
- Dimyauddin Duwayni, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Djam'an Satori dan Aan Koariah , *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2010)
- Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tiinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-'Adalah Vol, XII, No, 3, Juni 2015, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2015)
- H.A Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2011)
- Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta : Rajawali Pers,2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ibnu Hajar Al 'Asqalani (Fath Al-Bari bisyarhi Shahi Al Bukhari) hadist 353
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Juz III, Nur Amaliyah, Semarang,1958
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia,2007)
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,(Bogor: Graha Indonesia, 2012)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Nurfaizal, Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syari'ah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 Nopember 2013, UIN Suska Riau

Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya 2006)

Shahih al-bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al- Mughirah al- Bukhari (194-256 H), Tahqiq MusthafaDib alBugha, Daar Ibni Katsir, al Yamamah, BeirutCet, III, Th. 1470 H/1987 M.

Shahih Bukhari: *Kitab At-Tijarah*, Juz 3, h. 74, bab 2

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI_PRESS, Jakarta, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : ALFABETA,2011)

Suharsimi Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rineka Cipta, Jakarta,1991)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*(Jakarta, Rajawali Pers1992)

